

**MODEL TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KOTA JAMBI**
(The Model of Street Vendors Governance in Jambi City)

¹⁾ Tona Lubis, ²⁾Erwita, ³⁾Andi, dan ⁴⁾Raja

¹⁾ Ketua Jurusan Manajemen FEB, Universitas Jambi, ²⁾ Mahasiswa Doktoral ²⁾ FEB Universitas Brawijaya Malang dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan, dan ³⁾ Dosen FEB Universitas Jambi

ABSTRACT

The purpose of this research is to reveal the governance of street vendors, based on the street vendors' profiles namely finance, marketing, human resource and operational management in Jambi City. Those indicators will later be formulated to be a comprehensif model of street vendors governance. This research used mixed method, firstly used sequential exploratory design then qualitative and quantitative method. In qualitative method, this research uses Interpretive Phenomenology, and Partial Least Square (PLS) for the quantitative method. The result of this research shows that the finance, marketing and human resource management have effect on street vendors governance, however, operational management has no effect.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengungkapkan tatakelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dari aspek profil, pengelolaan keuangan, pemasaran, Sumber daya manusia, pengelolaan operasional di Kota Jambi. Variabel –variabel itu akan digunakan memformulasi model tata kelola PKL yang komprehensif. Penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), tahap pertama menggunakan sequential exploratory design dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Pada tahap penelitian kualitatif menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi selanjutnya, pada tahap penelitian kuantitatif menggunakan alat analisis inferensial berupa partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan, pemasaran dan SDM memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL, sedangkan pengelolaan operasional tidak berpengaruh.

Key words: street vendors, governance, finance, marketing, human resource, operational

Alamat Korespondensi: tonalubis@gmail.com

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terus berkembang pesat terutama pada negara-negara berkembang seperti di Asia. Hal ini dipicu oleh krisis keuangan pada Tahun 1998 yang melanda Asia (Bhowmik, 2005). Bhowmik (2005) menambahkan setelah krisis ekonomi itu, banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal sehingga beralih menjadi PKL untuk dapat bertahan hidup.

Dampak krisis juga dialami oleh para pekerja di Kota Jambi. Hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah PKL setiap tahunnya. Berdasarkan data dari DISPENDA Kota Jambi Tahun 2012, jumlah PKL pada Tahun 2009 sebanyak 1516, Tahun 2010 sebanyak 1895 dan Tahun 2011 sebanyak 2059. Menurut Bhowmik (2005), di beberapa negara Asia seperti Bangladesh, Srilanka, Vietnam dan Korea Selatan pengelolaan PKL tidak diatur oleh pemerintah. Sedangkan di Singapura, Malaysia dan Thailand pemerintah terlibat dalam pengelolaan PKL berupa perizinan, pemberian kredit dan pelatihan keahlian bisnis. Di Indonesia, pengelolaan PKL selama ini relatif hanya pada penertiban lokasi dan pemeliharaan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola PKL juga hanya fokus pada penertiban lokasi dan pemeliharaan lingkungan. Sementara masalah riil yang dihadapi oleh PKL sendiri lebih kompleks, meliputi masalah pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran.

Penelitian mengenai tata kelola pemerintah dan perusahaan telah banyak dilakukan (Mulbert, 2010; Crowther dan Seifi, 2010; Maman, Merita dan Mery, 2006). Tata Kelola perusahaan mengacu pada mekanisme atau prosedur yang mengontrol organisasi dalam mencapai tujuannya memaksimalkan laba jangka panjang bagi stakeholders. Tujuan akhir tatakelola perusahaan adalah menciptakan nilai perusahaan melalui kinerja yang berkesinambungan sebagai hasil dari pelaksanaan bisnis secara tepat (Global Association of Risk Professionals, 2005). Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai tatakelola PKL dari segi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, operasional dan pemasaran agar dapat dihasilkan model tata kelola yang komprehensif yang dapat diterapkan oleh PKL.

2. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah memperoleh pemahaman tentang tata kelola PKL yang sudah ada, selanjutnya dapat dihasilkan model tatakelola PKL yang komprehensif di Kota Jambi. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui profil PKL di Kota Jambi
2. Menganalisis pengelolaan keuangan PKL di Kota Jambi
3. Menganalisis pengelolaan Sumber daya manusia PKL di Kota Jambi
4. Menganalisis pengelolaan operasional PKL di Kota Jambi
5. Menganalisis pengelolaan pemasaran PKL di Kota Jambi
6. Menghasilkan model tata kelola PKL di Kota Jambi

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi

PKL didefinisikan sebagai seseorang yang menawarkan barang-barangnya untuk dijual kepada khalayak, tanpa memiliki sebuah tempat permanen untuk berjualan (Bhowmik, 2005). Bhowmik (2005) menambahkan bahwa PKL adalah orang yang berjualan menempati trotoar atau wilayah publik lainnya dan akan sering berpindah-pindah tempat. Berhubungan dengan hal tersebut, Bromley (2000) mengatakan bahwa PKL adalah sejenis penjual ritel yang menjual barang dan jasanya di jalan publik seperti gang-gang dan pinggiran jalan utama. Dia mengklaim juga bahwa PKL adalah sebuah fenomena global, ditemukan di seluruh negara di dunia terutama pada negara-negara

miskin. Sementara itu menurut Cross (2000), PKL adalah sebuah kategori dari aktivitas ekonomi yang tidak formal. Kategori ini meliputi produksi dan pertukaran dari barang dan jasa yang legal, akan tetapi aktivitasnya tidak disertai dengan izin yang resmi atau kontrak yang legal dari pihak terkait seperti pemasok dan klien.

2. Karakteristik dan Permasalahan PKL

Keberadaan PKL di era global terus meningkat, terutama pada negara-negara berkembang seperti di Asia. Hal ini disebabkan krisis keuangan pada Tahun 1998 melanda Asia sehingga para pekerja kehilangan pekerjaan di sektor formal kemudian beralih menjadi PKL untuk keberlangsungan hidup (Bhowmik, 2005). Menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010), keberadaan PKL tidak hanya bermanfaat bagi kelompok kelas bawah saja tetapi juga kelompok kelas bawah. Pendapat ini sejalan dengan Bhowmik (2005) yang berargumen bahwa PKL menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif rendah dan bisa terjangkau oleh semua kalangan ekonomi. Kehadiran PKL sendiri terkadang menimbulkan masalah bagi masyarakat. Contohnya menurut Akharuzzaman dan Deguchi (2010) berkaitan dengan masalah sampah, dimana para PKL membuang sampah barang dagangannya di jalanan. Kemudian menurut Bromley, (2000) PKL dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kebanyakan memadati sisi-sisi jalan raya sehingga mengakibatkan lalu lintas semakin padat. Lebih lanjut PKL akan memblok para pejalan kaki untuk berjalan di trotoar dikarenakan trotoar digunakan untuk berjualan. PKL juga menimbulkan masalah sosial lainnya, karena terkadang mempekerjakan anak-anak kecil untuk berdagang.

Karakteristik yang melekat dari PKL ini adalah kebanyakan menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan (Phil, 2010), tempat berjualan sering berpindah-pindah tergantung besarnya keuntungan yang diperoleh (Bromley, 2000), pola kerja yang tidak menentu seperti bekerja seharian penuh, paruh waktu atau sesuai dengan musim, tenaga kerjanya bisa satu orang atau lebih dan biasanya dari kalangan keluarga, lemahnya permodalan sehingga barang yang dijual kualitasnya juga rendah, wanita lebih banyak terlibat menjadi PKL. Selanjutnya menurut dikatakan tidak adanya izin mendirikan usaha yang resmi dari instansi terkait kebanyakan PKL berasal dari level ekonomi bawah (Bromley, 2000; Bhowmik, 2005; Akharuzzaman dan Deguchi, 2010). Dengan demikian dapat disampaikan bahwa pengelolaan PKL banyak dilatarbelakangi oleh masalah keluarga PKL, bahkan berkaitan dengan masalah pendidikan mereka.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah semua PKL di Kota Jambi yaitu sebanyak 2059 (data DISPENDA Kota Jambi Tahun 2012). Sampel ini sesuai dengan perhitungan untuk jumlah populasi yang telah diketahui dapat digunakan rumus berikut.

$$n = \frac{N \cdot d}{1 + d}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = level signifikansi yang diinginkan yaitu 0.05

Sampel PKL dengan jumlah Populasi sebanyak 2059 PKL maka:

$$n = \frac{2059}{2059 (0,05) + 1} = 334,93 \text{ dibulatkan } 335 \text{ unit}$$

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuisisioner pada responden. Sumber data adalah pendapat dan persepsi dari pedagang kaki lima (PKL) mengenai tata kelola usaha mereka.

3. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode kombinasi (*mixed method*), yaitu kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian kombinasi yang digunakan adalah *Sequential Exploratory Design*, yaitu pada tahap awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif.

4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memperoleh data dan informasi, dilakukan pengungkapan sejumlah variabel lengkap dengan konsep, dimensi, indikator, ukuran, skalanya. Variabel penelitian yang utama adalah :

- Variabel bebas, yaitu variabel pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran, pengelolaan SDM dan pengelolaan operasional
- Variabel terikat, yaitu variabel tata kelola PKL

Secara rinci mengenai operasionalisasi variabel ini dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut ini.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran
Pengelolaan Keuangan (X ₁)	X _{1.1} = sumber modal	Sumber modal PKL berasal dari modal sendiri
	X _{1.2} = Besaran modal awal	Modal awal PKL berkisar 1 – 7 juta rupiah
	X _{1.3} = Biaya operasional	Biaya operasional perhari PKL tidak lebih dari Rp 500.000,-
	X _{1.4} = Asset /Harta	Assets/harta yang digunakan untuk usaha sangat penting bagi PKL
	X _{1.5} = Pencatatan keuangan	pengeluaran keuangan penting bagi PKL
Pengelolaan pemasaran (X ₂)	X _{2.1} = produk	Produk yang baik dan berkualitas adalah penting bagi PKL
	X _{2.2} = Harga	PKL harus menetapkan harga yang mampu bersaing
	X _{2.3} = Promosi	PKL selalu melakukan promosi produk untuk menarik pelanggan
	X _{2.4} = Distribusi	Penentuan tempat yang tepat untuk menjual produknya sangat diperhatikan oleh PKL
Pengelolaan SDM (X ₃)	X _{3.1} = perencanaan SDM	PKL belum melakukan perencanaan SDM baik dari rekrutment, seleksi maupun penempatan SDM
	X _{3.2} = Upah/kompensasi	Belum ada ketentuan yang jelas untuk penentuan upah tenaga kerja karena PKL masih menganggap usahanya adalah usaha keluarga
	X _{3.3} = Tenaga kerja	PKL cenderung memanfaatkan tenaga sendiri atau keluarga untuk menjalankan usaha
Pengelolaan Operasional (X ₄)	X _{4.1} = kapasitas produksi	PKL melakukan penentuan kapasitas Produksi
	X _{4.2} = Penentuan lokasi	PKL melakukan penentuan lokasi usaha yang strategis
	X _{4.3} = layout usaha	PKL membuat layout usaha tetapi bersifat tidak permanen
	X _{4.4} = aliran kerja	PKL menentukan dasar aliran kerja tetapi masih sederhana
Tata Kelola PKL (Y)	Y ₁ = Transparansi	PKL harus transparan dengan semua prosedur tata kelola
	Y ₂ = akuntabilitas	PKL harus mempunyai laporan keuangan yang jelas
	Y ₃ = tanggung jawab	PKL harus mau bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan usaha yang diambil
	Y ₄ = Adil	PKL harus menjalankan usahanya dengan adil (tidak memihak atau berprasangka buruk kepada siapapun)

Indikator dan ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ukuran ordinal skala 1 sampai dengan 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Responden penelitian adalah seluruh PKL di Kota Jambi; dan yang menjadi sampel sesuai dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling* tipe *judgement sampling*. Menurut Jogiyanto (2010), *judgement sampling* adalah *purposive sampling* dengan kriteria yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 335 PKL.

a) Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian, mayoritas PKL responden adalah Laki-laki yaitu sebesar 81,5% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan hanya 18,5%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung mendominasi menjadi PKL terutama dikarenakan alasan waktu melakukan usahanya yang dimulai pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 02.00 dini hari, sehingga PKL laki-laki yang lebih sesuai dengan jam kerja tersebut.

b) Responden berdasarkan Jenis/Bidang Usaha

Dari hasil pengolahan data primer, berkaitan dengan jenis usaha yang dikelola oleh responden dapat dilihat pada Tabel 2., berikut.

Tabel 2. Responden Menurut Jenis/Bidang Usaha

No.	Jenis/Bidang Usaha	Jumlah Responden	Persentase
1	Penjualan Makanan	220	65,67
2	Penjualan Minuman	100	29,85
3	Penjualan barang lain-lain	15	4,48
Jumlah		335	100

Berdasarkan Tabel 2., dapat dilihat bahwa bidang usaha PKL penjualan makanan sebesar 65,67%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis makanan yang banyak diperdagangkan PKL seperti nasi uduk, nasi goreng, roti bakar, martabak dan lain-lain memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Selanjutnya diikuti oleh penjualan minuman seperti bandrek, sekoteng, jus buah dan lain-lain juga menjadi jenis usaha yang dipilih oleh PKL yaitu sebesar 29,85%. Sedangkan sebagian kecil yaitu 4,48% adalah penjualan barang seperti mainan, asesoris dan pakaian dan lain-lain juga dipilih PKL menjadi bidang usaha mereka.

c) Responden berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden, hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3..

Tabel 3. Responden Menurut Usia

No	Rentang Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< 20 th	10	2,98%
2	20-25 th	80	23,88%
3	25-30 th	154	45,97%
4	30-40 th	55	16,42%
5	>40 th	36	10,75%
Jumlah		335	100%

Dari Tabel 4.3. diperoleh gambaran bahwa PKL yang menjalankan usahanya di Kota Jambi didominasi rentang usia 25 – 30 tahun yaitu sebesar 45,97%. Usia produktif ini menjadi nilai tambah mereka agar mampu menjalankan usahanya dengan maksimal.

d) Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jika didasarkan pendidikan terakhir yang mereka miliki, responden PKL dikelompokkan sebagaimana pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	19	5,67
2	SMP	55	16,42
3	SMA	234	69,85
4	S1	27	8,06
Jumlah		335	100

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa sebagian besar PKL memiliki tingkat pendidikan cukup baik yaitu tingkat SMA sebesar 69,85%. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau mengembangkan usahanya dengan membekali ilmu yang mereka dapatkan pada saat mengikuti pendidikan SMA tersebut.

e) Responden berdasarkan Jumlah Karyawan

Jika didasarkan pada jumlah karyawan yang dimiliki responden PKL dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5. Responden Menurut Jumlah Karyawan

No	Jumlah Karyawan	Jumlah Responden	Persentase
1	< 3 orang	116	34,63
2	3 – 7 orang	200	59,70
3	7-10 orang	19	5,67
Jumlah		335	100

Berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki responden terlihat bahwa dominan PKL di Kota Jambi memiliki sekitar 3–7 orang karyawan dalam membantu usaha mereka atau sebesar 59,70%. Tenaga kerja itu terutama berasal dari keluarga dekat mereka sendiri dengan alasan kemudahan dalam mengkoordinir.

2. Analisis Data

a) Analisis Kualitatif untuk Penentuan Profil PKL di Kota Jambi

Pada tahap pertama sesuai dengan metode penelitian, dilakukan Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi menggunakan pendekatan *indepth interview* (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi kepada PKL di Kota

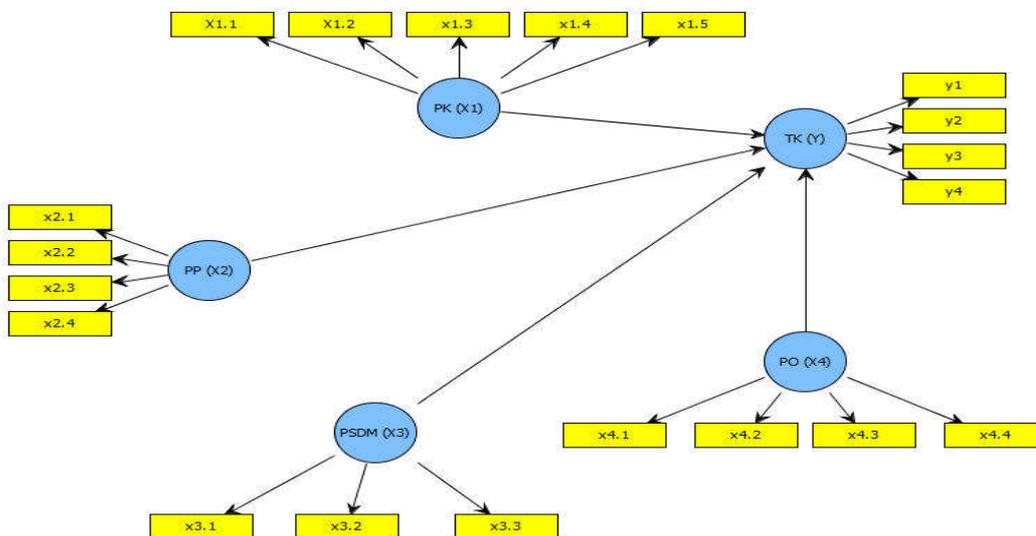
Jambi. Pengumpulan data ini ntuk memperoleh informasi mengenai profil dari Pedagang kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Jambi.

Hasil dari tahap pertama memberikan gambaran mengenai profil PKL dalam hal pengelolaan usaha yang terdiri dari pengelolaan keuangan, pemasaran,SDM (Sumber Daya Manusia) dan operasional. Pengelolaan keuangan PKL terutama terkait dengan modal awal, besaran modal awal, biaya operasional,kepemilikan aset dan pencatatan keuangan. Pengelolaan pemasaran terkait dengan produk yang dijual,harga produk, promosi dan distribusi. Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait dengan perencanaan SDM, Upah/kompensasi dan tenaga kerja. Pengelolaan operasional terkait dengan kapasitas produksi, penentuan lokasi,layout usaha dan aliran kerja. Sedangkan mengenai tata kelola usaha yang baik dikaitkan dengan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.

b) Analisis Kuantitatif menggunakan Partial Least Square (PLS)

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian (Ghozali, 2006). SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. Permodelandengan tujuan prediksi memiliki konsekuensi bahwa pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi (Jogiyanto 2010). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software SmartPLS ver 2 for windows. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Partial Least Square (PLS) yaitu meliputi sebagai berikut.

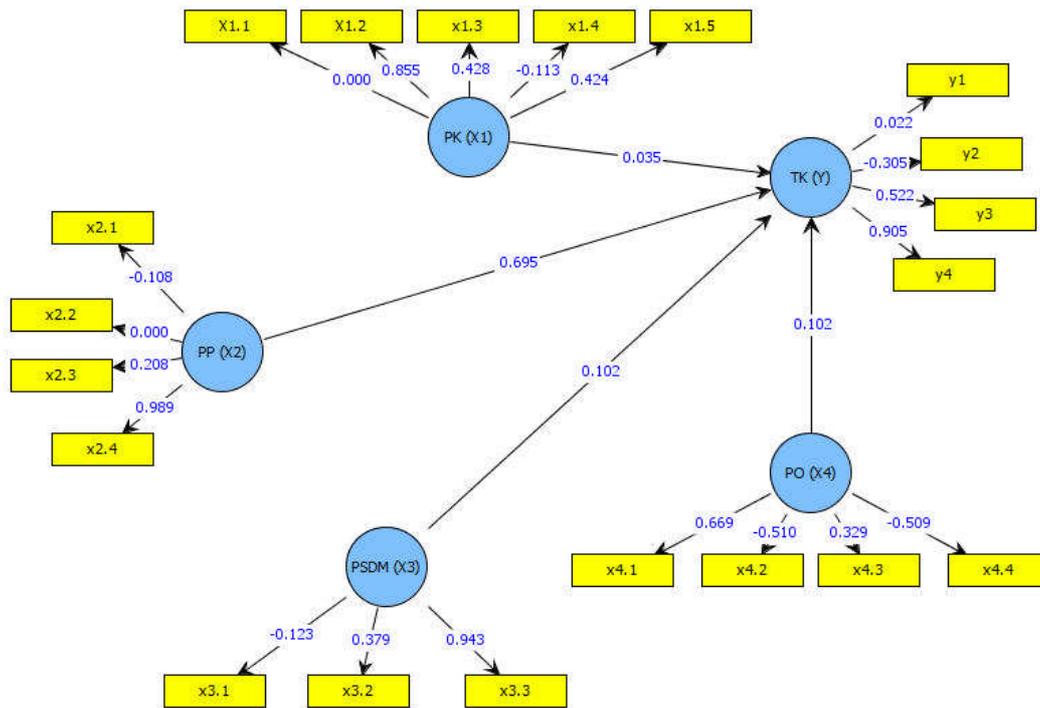
• **Menentukan model awal penelitian**



Gambar 4.1. Model awal Penelitian

Dalam model awal penelitian pada Gambar 4.1. terdapat empat variabel independen yang terdiri dari variabel pengelolaan keuangan/PK (X1) dengan indikator sumber modal (x1.1), besaran modal awal (x1.2), Biaya operasional (x1.3), Asset/harta (x1.4), dan pencatatan keuangan (x1.5). Variabel pengelolaan pemasaran/PP (X2)

dengan indikator produk (x2.1), harga (x2.2), promosi (x2.3) dan distribusi (x2.4). Variabel pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia)/PSDM (X3) dengan indikator perencanaan SDM (x3.1), Upah/kompensasi (x3.2), tenaga kerja (x3.3). Variabel pengelolaan operasional/PO (X4) dengan indikator kapasitas produksi (x4.1), penentuan lokasi (x4.2), layout usaha (x4.3) dan aliran kerja (x4.4). Serta satu variabel dependen yaitu variabel Tata kelola PKL/ TK(Y) dengan indikator transparansi (y1), akuntabilitas (y2), tanggung jawab (y3) dan adil (y4).

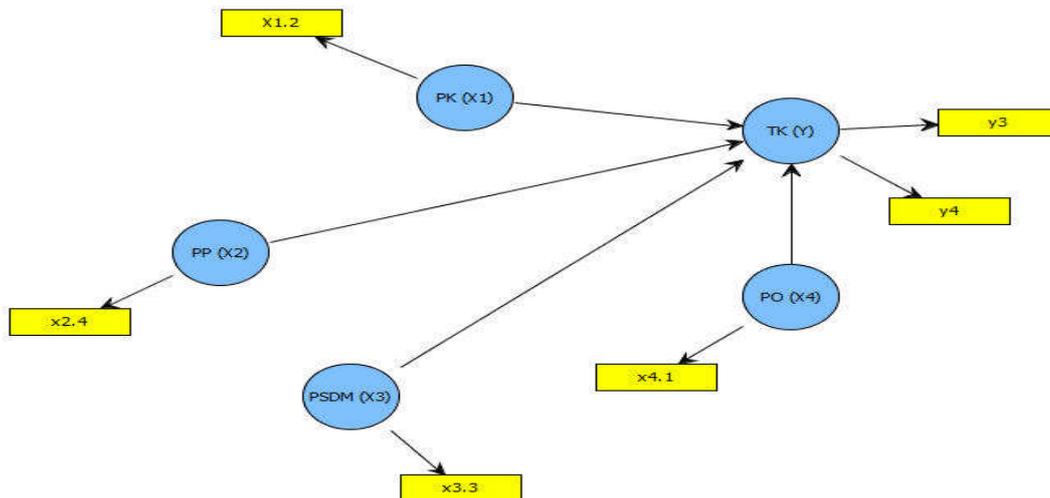


Gambar 4.2. Hasil Perhitungan model awal penelitian

Menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2006) suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70. Sedangkan *loading factor* 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk model yang masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Smart PLS tersebut pada Gambar 4.2, terlihat bahwa pada variabel Pengelolaan Keuangan PK (X1) hanya indikator besaran modal awal (X1.2) memiliki *loading factor* 0,855 (diatas 0,5) sedangkan indikator lainnya dibawah 0,5 sehingga didrop(dikeluarkan) dalam model. Pada Variabel Pengelolaan Pemasaran (x2) hanya indikator distribusi (X2.4) memiliki *loading factor* 0,989 (diatas 0, 5) sedangkan indikator lainnya dibawah 0,5 sehingga didrop (dikeluarkan) dalam model. Pada Variabel Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) (X3) hanya indikator tenaga kerja (X3.3) memiliki *loading factor* 0,943 (diatas0,5) sedangkan indikator lainnya dibawah 0,5 sehingga didrop (dikeluarkan) dalam model. Pada variabel Pengelolaan Operasional (X4) hanya indikator kapasitas produksi (X4.1) memiliki *loading factor* 0,669 (diatas 0, 5) sedangkan indicator lainnya dibawah 0,5 sehingga didrop (dikeluarkan) dalam model.

- Memodifikasi model setelah dilakukan dropping indikator yang tidak signifikan (loading factor < 0,5)

Dengan hasil dropping tersebut maka modifikasi model penelitian dapat digambarkan di smart PLS sebagai berikut.



Gambar 4.3. Model Penelitian setelah dilakukan Dropping Indikator yang memiliki loading Factor dibawah 0,50

3. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian. Hipotesis penelitian terdiri dari :

- H₁= Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL
- H₂= Pengelolaan Pemasaran memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL
- H₃ = Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL
- H₄ = Pengelolaan Operasioanal memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola PKL

Mengacu kepada hipotesis tersebut, maka pengujian dilakukan terhadap outer model PLS yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

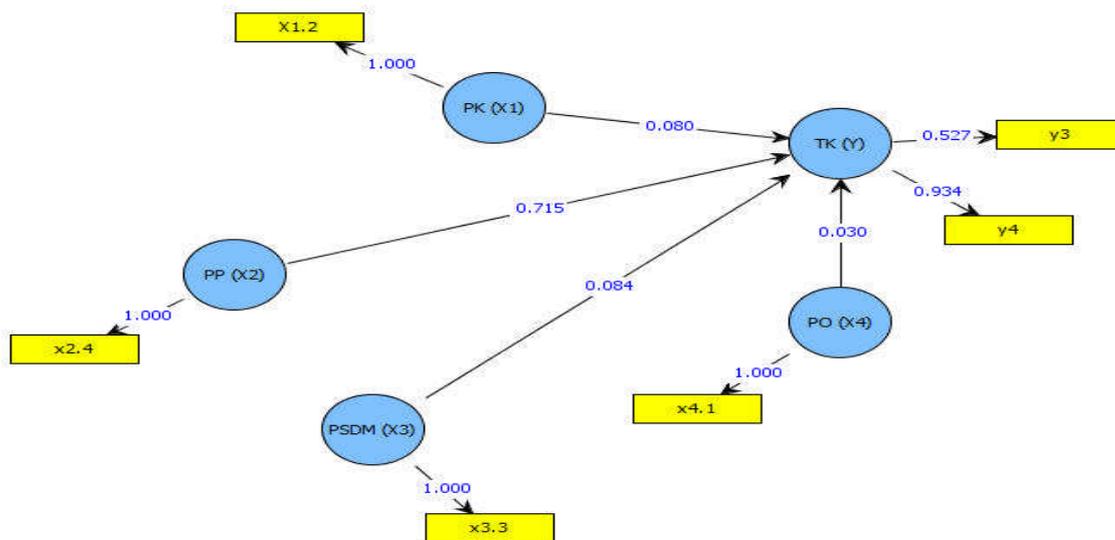
Tabel 6. Hasil perhitungan PLS setelah Dropping Indikator

results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
PK (X1) -> TK (Y)	0.080	0.080	0.037	2.159
PP (X2) -> TK (Y)	0.715	0.713	0.047	15.354
PSDM (X3) -> TK (Y)	0.084	0.089	0.038	2.212
PO (X4) -> TK (Y)	0.030	0.028	0.039	0.767

Berdasarkan *Table results for inner weights* tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan dengan nilai koefisien 0,080, Pengelolaan Pemasaran dengan nilai koefisien 0,715, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia nilai koefisien 0,084 mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Tata kelola Usaha. Dengan hasil ini berarti hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 diterima bahwa variabel pengelolaan keuangan, pemasaran dan SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL. Namun variabel Pengelolaan Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola usaha karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel ($0,767 < 1,96$) sehingga hipotesis 4 ditolak.



Gambar 4.5. Hasil perhitungan PLS setelah Dropping Indikator

4. Pembahasan

a) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap tata Kelola PKL

Berdasarkan hasil pengujian PLS, pengelolaan keuangan yang dihubungkan dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 1 menunjukkan hasil yang signifikan dengan koefisien 0,080 dan t hitung $>$ t tabel ($2,159 > 1,96$). Berarti pengelolaan keuangan yang direfleksikan oleh indikator besaran modal awal akan mempengaruhi tata kelola PKL di Kota Jambi. Hasil ini juga menjelaskan apa yang telah dipaparkan Clarke (2003) dan Maman dkk (2006) bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya tergantung kepada keberadaan pasar, utang dan pengawasan korporasi tetapi juga harus mampu menyerap modal sebesar-besarnya untuk melakukan ekspansi usaha. Hal ini akan dapat diadopsi oleh PKL bahwa dalam tata kelola usaha harus memperhatikan besaran modal yang dimiliki.

b) Pengaruh Pengelolaan Pemasaran Terhadap Tata Kelola PKL

Berdasarkan hasil pengujian PLS, pengelolaan pemasaran yang dihubungkan dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 2 menunjukkan hasil yang signifikan dengan koefisien 0,715 dan t hitung $>$ t tabel ($15,354 > 1,96$). Berarti variabel pengelolaan pemasaran yang direfleksikan oleh indikator distribusi memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL di Kota Jambi. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Bromley (2000) bahwa PKL lebih memilih tempat berjualan yang berpindah-pindah yang memberikan

keuntungan bagi mereka. Kondisi tempat usaha yang tidak menetap ini akan menuntut tanggung jawab yang besar sebagai salah satu prinsip tata kelola yang baik.

c) Pengaruh Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) Terhadap Tata Kelola PKL

Berdasarkan hasil pengujian PLS, pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dihubungkan dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 3 menunjukkan hasil yang signifikan dengan koefisien 0,084 dan t hitung $>$ t tabel ($2,212 > 1,96$). Berarti variabel pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang direfleksikan oleh indikator Tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL di Kota Jambi. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Bromley (2000) bahwa PKL bisa saja memiliki tenaga kerja satu atau lebih namun biasanya hanya berasal dari kalangan keluarga. Kondisi ini jika dikaitkan dengan prinsip tata kelola korporasi yang dapat diadopsi oleh PKL, seharusnya memberikan batasan kewenangan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan hal itu agak sulit dilakukan jika tenaga kerjanya bersal dari keluarga sendiri.

d) Pengaruh Pengelolaan Operasional Terhadap tata Kelola PKL

Berdasarkan hasil pengujian PLS, pengelolaan operasional yang dihubungkan dengan tata kelola PKL dalam hipotesis 4 menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan koefisien 0,030 dan t hitung $>$ t tabel ($0,767 < 1,96$). Berarti variabel pengelolaan operasional yang direfleksikan oleh indikator Kapasitas produksi tidak memiliki pengaruh terhadap tata kelola PKL di Kota Jambi. Hal ini tidak sesuai dengan yang dipaparkan oleh Maman dkk., (2006) bahwa aktivitas produksi dan distribusi yang ekstensif akan mendukung tata kelola korporasi. Aktivitas tersebut harus ditunjang penentuan kapasitas produksi yang tepat. Berarti PKL di Kota Jambi yang belum dapat menentukan kapasitas produksinya akan sulit mengembangkan usaha atau ekspansi sebagai salah satu indikator pelaksanaan tata kelola yang baik. Belum ditentukannya kapasitas produksi itu juga yang membuat PKL masih merasa belum perlu untuk menentukan lokasi permanen untuk usaha mereka.

e) Model Tata Kelola PKL

Berdasarkan penelitian diketahui model tata kelola PKL di Kota Jambi dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan, pemasaran dan SDM (Sumber Daya Manusia). Sedangkan pengelolaan operasional tidak mempengaruhi. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pengelolaan operasional yang tepat akan mengarahkan mereka untuk mengembangkan usaha yang lebih besar lagi dengan lokasi usaha yang permanen dan pada akhirnya akan membuat PKL mampu untuk meningkatkan kinerja usahanya secara berkelanjutan sebagaimana yang dipaparkan oleh Crowther dan Seifi (2010). Selain itu juga akan mengurangi permasalahan PKL terkait dengan lokasi usaha yang mengambil areal publik, perizinan maupun sosial lainnya.

Model tata kelola PKL di Kota Jambi hasil dari penelitian tahun pertama ini dapat diimplementasikan langsung kepada PKL melalui *pilot project* yang akan dilakukan pada tahun kedua penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan, pengelolaan pemasaran dan pengelolaan SDM memiliki pengaruh terhadap Tata Kelola PKL di Kota Jambi, terbukti dengan Hasil perhitungan PLS dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (Pengelolaan Keuangan 2,159, Pengelolaan Pemasaran 15,354 dan Pengelolaan SDM 2,212 > 1,96)
2. Pengelolaan operasional tidak berpengaruh terhadap tata kelola PKL di Kota Jambi, ini terbukti dengan hasil perhitungan PLS dimana variabel tersebut memiliki nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel (Pengelolaan Operasional 0,767 < 1,96).
3. Model tata kelola PKL di Kota Jambi hanya dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan, pemasaran dan SDM sementara operasionalnya tidak berpengaruh, hal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan diteliti lebih lanjut karena ketidaktepatan PKL dalam mengelola operasionalnya juga akan berimbas pada lingkungan sekitarnya sehingga pada akhirnya tetap akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya.

2. Saran

1. PKL di Kota Jambi agar lebih memperhatikan pengelolaan operasional seperti kapasitas produksi, lay out usaha, penentuan lokasi dan aliran kerja agar dapat menunjang tata kelola usaha yang baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya dalam kaitannya dengan penentuan indikator penelitian kuantitatif yang mengacu pada hasil yang diperoleh tahap penelitian kualitatif dalam penelitian ini masih memerlukan proses penggalian informasi lebih mendalam agar penentuan indikatornya lebih akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akharuzzaman, M dan Deguchi, A., 2010. *Public Management for Street Vendors Problems in Dhaka City, Bangladesh. International Conference On Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10)*, Japan.
- Bhowmik, S.K., 2005. *Street Vendors in Asia: A Review. Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 22/2, pp.2256-2264.
- Bromley, Ray. 2000. *Street Vending and Public Policy: A Global Review. International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 20, No. ½, pp. 30-52.
- Clarke, D.C. 2003. *Corporate Governance in China: an Overview. Working Paper University of Washington School of Law*.
- Cross, J.C. 2000. *Street Vendors, Modernity, and Post modernity: Conflict and Compromise in The Global Economy. International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 20, No. 12, pp. 1-29.
- Crowther, D., Seifi, S., 2010. *Corporate Governance and Risk Management. Ventus Publishing ApS*.

- Ghazali, I.,2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang.
- Jogiyanto, 2010. *Metode Penelitian Sistem Informasi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Yogyakarta.
- Maman,Merita dan Mery., 2006. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan, dan Karakteristik Tata Kelola Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
- Mulbert, P.O., 2010. *Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis-Theory, Evidence, Reforms. ECGI Law Working Paper*.
- Phil, J.W.D.,2010. *Street Vendors and The Dynamics of the Informal Economy: Evidence in Vung Tau, Vietnam. Asian Social Science*, Vo. 6, No.11, pp. 159-165.